

ANALISIS YURIDIS PEMAKNAAN PASAL 33 (1) UUD 1945
BERDASARKAN PANCASILA DARI PERSPEKTIF HUKUM
TATA NEGARA

TESIS

Oleh

RALIAN JAWALSEN

2002190074



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023

ANALISIS YURIDIS PEMAKNAAN PASAL 33 (1) UUD 1945
BERDASARKAN PANCASILA DARI PERSPEKTIF HUKUM
TATA NEGARA

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

RALIAN JAWALSEN

2002190074



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA

2023



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ralian Jawalsen
NIM : 2002190074
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMAKNAAN PASAL 33 (1) UUD 1945 BERDASARKAN PANCASILA DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA”, adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 26 Juni 2023



Ralian Jawalsen
NIM: 2002190074



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
ANALISIS YURIDIS PEMAKNAN PASAL 33 (1) UUD 1945
BERDASARKAN PANCASILA
DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Oleh

Nama : Ralian Jawalsen, S.H.

NIM : 2002190074

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, Senin, 26 Juni 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 0314086404

Pembimbing II

Dr. Fernando Silalahi, ST., S.H., M.H., C.L.A.
NIP/NIDN: 0322117104

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 141104/027096504

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadheta Nadeak, M.Pd., PA
NIP/NIDN: 001473/0320116402





UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal Senin, 26 Juni 2023 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Ralian Jawalsen
NIM : 2002190074
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : H u k u m T a t a N e g a r a

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMAKNAAN PASAL 33 (1) UUD 1945 BERDASARKAN PANCASILA DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. <u>Dr. Aartje Tehupeioiry, S.H.,M.H.</u>	Sebagai Ketua	
2. <u>Dr. Fernando Silalahi, ST.,S.H.,M.H., C.L.A.</u>	Sebagai Anggota	
3. <u>Prof. Dr. Jhon Pieris, S.H.,M.S.</u>	Sebagai Anggota	

Jakarta, 26 Juni 2023



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ralian Jawalsen
NIM : 2002190074
Fakultas : Program Pascasarjana
Jurusan/Program Studi : Magister Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Analisis Yuridis Pemaknaan Pasal 33 (1) UUD 1945 Berdasarkan Pancasila dari Perspektif Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia darisegala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 26 Juni 2023

Yang menyatakan



(Ralian Jawalsen)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya dalam skripsi yang berjudul "**Analisis Yuridis Pemaknaan Pasal 33 (1) UUD 1945 Berdasarkan Pancasila dari Perspektif Hukum Tata Negara**" ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan baik. Penyelesaian tesis ini diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Kristen Indonesia, Program Studi Magister dan Ilmu Hukum. Dalam penyelesaian Tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada Ibu Dr. Aartje Tehupeiori. S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing I, yang telah banyak membantu penulis memberikan saran, ide dan masukan-masukan sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan juga Bapak Dr. Fernando Silalahi., ST., S.H., M.H.,C.L.A. selaku dosen Pembimbing II yang juga telah membimbing Penulis didalam pembuatan Proposal Penelitian Tesis ini diselesaikan.

Perkenankan juga Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, yaitu kepada:

1. Rektor Universitas Kristen Indonesia, Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H., M.B.A.
2. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty. S.H.,M.H.

3. **Dr. Budiman NPD Sinaga.SH.,MH**, guru yang juga pengajar dosen di Universitas HKBP Nomensen Medan yang menjadi teman diskusi dan memberi masukan terkait Hukum Tata Negara.
4. Rekan-rekan Mahasiswa Pasca Sarjana Angkatan Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Kristen Indonesia.

Secara khusus ucapan terima kasih buat orang tua Mama **BONUR PANJAITAN** dan Isteriku **BERLIANA LAURITA SILITONGA** yang dengan sabar memberikan dan penuh perhatian memberi dorongan penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada para senior-senior di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) yakni, Dr. Sahat HMT Sinaga, Dr. Michael Wattimena.,SE., M.Si, Willem Wandik. S.Sos., Sahat Sinaga, Dr. Nikson Gans Lalu. SH., MH, Janedi Jagau, Alfrianda Reza Ngebu, Timbul Siregar, Sonya Sinombor, Clara Hutajulu, Mutiara Gultom, dan kawan-kawan aktivis GMKI Jakarta Angkatan 1998.

Seperti kata pepatah lama yang akan diingat sepanjang masa "**Tidak ada gading yang tidak retak**" demikian pula tesis ini masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun penulisannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini.

Jakarta, 26 Juni 2023

Ralian Jawalsen.S.H.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	18
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	19
1.4. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep.....	19
1.5. Metode Penelitian.....	30
1.6. Sistematika Penulisan	42
BAB II.....	43
TINJAUAN PUSTAKA.....	43
2.1 Perekonomian Sebagai Usaha Bersama.....	43
2.2. Negara Pancasila.....	48
BAB III.....	56
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	56
3.1. Hasil Penelitian.....	56
3.2. Analisis.....	92
BAB IV.....	108
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA RUMUSAN MASALAH.....	108
4.1. Hasil Penelitian.....	108

4.2. Analisis.....	121
BAB V.....	132
PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran-saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	134
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	142



ABSTRAK

Analisis Yuridis Pemaknaan Pasal 33 (1) UUD 1945 Berdasarkan Pancasila Dari Perspektif Hukum Tata Negara

Tujuan negara adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, karena untuk mewujudkan itu dibutuhkan negara kesejahteraan (Welfare State) yang berkeadilan, dan dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia maka dibutuhkan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, dan Pemerintah hadir tidak sekedar memberdayakan masyarakat, tetapi dapat mewujudkan kesejahteraan yang dicita-citakan berdasarkan Pasal 33 (1) UUD 1945 yang dijelaskan dalam setiap peraturan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan teori keadilan John Rawls, teori negara kesejahteraan berdasarkan pemikiran Kranenburg. Namun, dalam untuk mewujudkan kesejahteraan seperti yang dikemukakan Emile Durkheim Teori hukum ada dalam masyarakat, khususnya moralitas sosial hukum. Strategi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah mengatur eksplorasi hukum sebagai data Pasal 33 (1) UUD 1945 Indonesia memiliki jumlah koperasi terbesar di dunia yang seharusnya menjadi kekuatan penting dalam peningkatan ekonomi mengingat pedoman kerja sama bersama dan menetapkan orang-orang yang bermanfaat sebagai pemilik dan klien dari organisasi yang bermanfaat. Bahwa pemerintah kurang serius dalam membuat regulasi bidang ekonomi yang menguntungkan kepentingan masyarakat. Kasus KSP-SB dan KSP Indosurya yang merugikan masyarakat ratusan triliun membuktikan bahwa Pemerintah belum hadir maksimal dalam melindungi para pelaku ekonomi koperasi. Karena, landasan hukum kesejahteraan yang terdapat dalam UUD 1945 dan Pancasila merupakan fondasi di mana sistem ekonomi kerakyatan dibangun. Hal ini karena negara bantuan pemerintah mengandung sisi atas ekuitas yang merupakan jiwa dari pergantian peristiwa keuangan. Dalam mengakui bantuan pemerintah cukup ramah maka, pemerintah lebih memusatkan perekonomian masyarakat ke arah negara yang sejahtera maka perlunya peran pemerintah hadir melalui regulasi perekonomian yang memberdayakan masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Kedua, pemerintah memberikan kesempatan kepada koperasi untuk tampil dalam memegang saham di perusahaan negara atau perusahaan daerah (BUMN/BUMD). ketiga, pemerintah meminjamkan bantuan kepada masyarakat tanpa bunga atau bunga lunak sebagai pelaku ekonomi yang bersaskan kekeluargaan. Keempat, Pemerintah melindungi usaha kecil dan menengah tumbuh dengan subur untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci : Koperasi, Sejahtera, adil

ABSTRACT

Juridical Analysis of the Meaning of Article 33 (1) of the 1945 Constitution Based on Pancasila From the Perspective of Constitutional Law

The goal of the state is to create a just and prosperous society, because to achieve this requires a just welfare state, and in overcoming poverty in Indonesia, community participation is needed in carrying out economic activities, and the government is present, not only empowering the community but also realizing the desired prosperity based on Article 33 (1) of the 1945 Constitution, which is explained in every regulation, government regulation, and ministerial decree. To realize social welfare, John Rawls's theory of justice and the theory of a welfare state based on Kranenburg's thinking are needed. However, in order to realize prosperity, as stated by Emile Durkheim, legal theory must exist in society, especially legal social morality. The cases of KSP-SB and KSP Indosurya, which cost the community hundreds of trillions, prove that the government has not been optimally present in protecting cooperative economic actors. Because the legal basis for welfare contained in the 1945 Constitution and Pancasila is the foundation on which a people's economic system is built, This is because the government's aid state contains an equity upside, which is the soul of the turn of financial events. In acknowledging that government assistance is quite friendly, the government focuses more on the people's economy towards a prosperous state, so the government needs to be present through economic regulations that empower the community as economic actors. Second, the government provides opportunities for cooperatives to appear by holding shares in state or private companies. regional government (BUMN/BUMD). Third, the government lends assistance to the community without interest or soft interest as an economic actor based on kinship. Fourth, the government protects small and medium enterprises from thriving to increase people's income, which will have an impact on people's economic growth.

Keywords: cooperative, prosperous, fair